

SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR
PROPERTI DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA SELAMA 2015-2018)**

MUSTAFAINUL AKHYAR



**DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SELAMA 2015-2018)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MUSTAFAINUL AKHYAR

A21115510



kepada

**DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SELAMA 2015-2018)

disusun dan diajukan oleh

MUSTAFAINUL AKHYAR

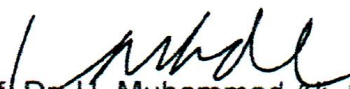
A21115510

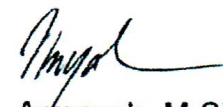
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 18 Maret 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Muhammad Ali, SE., MS
NIP.19610324 198702 1 001


Drs. Armayah, M.Si
NIP.19590619 198503 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dra. Hj. Dian Anggraecce Sigit Parawansa, M.Si., Ph.D.
NIP.19620405 198702 2 001

SKRIPSI

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SELAMA 2015-2018)

disusun dan diajukan oleh

MUSTAFAINUL AKHYAR

A21115510

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 18 Maret 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Muhammad Ali, SE., M.S	Ketua	
2.	Drs. Armayah, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si., CIPM	Anggota	3. 
4.	Dr. Julius Jilbert, SE., M.IT	Anggota	4. 

Ketua Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Prof. Dra. Hj. Dian Anggraecce Sigit Parawansa, M.Si., Ph.D.

NIP.19620405 198702 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafainul Akhyar
NIM : A211 15 510
Jurusan/Program Studi : Manajemen S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI DAN
REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
SELAMA 2015-2018)**

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Mustafainul Akhyar

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Yang Maha Sempurna, atas segala limpahan rahmat dan atas izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama 2015-2018)”. Tak lupa pula segenap salawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, Manusia Sempurna yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Gagasan utama yang penulis sajikan dalam penelitian ini muncul dari hasil pengamatan penulis terhadap berbagai fenomena dimana perusahaan-perusahaan mengalami performa yang buruk dan bahkan kebangkrutan akibat kurang atau tidak diterapkannya tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Meskipun terdapat berbagai kendala dan keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini, namun berkat arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan II, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin beserta Wakil Dekan I Bidang

Akademik dan Inovasi, Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Perencanaan dan Sumber Daya, serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

2. Prof. Dra. Hj. Dian Anggraece Sigit Parawansa, M.Si., Ph.D. dan Andi Aswan, SE., MBA., DBA. selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. H. Muhammad Ali, SE., MS. dan Drs. Armayah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. M. Sobarsyah, SE., M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si., CIPM. dan Dr. Julius Jilbert, SE., M.IT. selaku Dosen Penguji.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Makassar, Maret 2021

Penulis

ABSTRAK

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2015-2018)

Mustafainul Akhyar
Muhammad Ali
Armayah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan (ROA). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 194 perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan dua kriteria dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan dengan periode pengamatan dari tahun 2015-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data laporan keuangan dan laporan tahunan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F, serta analisis koefisien korelasi (R^2). Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA).

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan *Return on Assets* (ROA)

ABSTRACT

The Effect of Good Corporate Governance on the Financial Performance (Case Study in Companies in the Property and Real Estate Sub-Sector Listed on the IDX during 2015-2018)

Mustafainul Akhyar
Muhammad Ali
Armayah

This research aims to determine and analyze the effect of Good Corporate Governance on financial performance (ROA). The population in this research was 194 property and real estate sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2015-2018. This research used purposive sampling with two criteria and the sample used in this research were 30 companies with observation period from 2015-2018. The type of data used in this research is secondary data using financial reports and annual reports. The analysis technique used is multiple regression and hypothesis testing using t-test and F-test and correlation coefficient analysis (R^2). In addition, classical assumption test was carried out which included the normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, and heteroscedasticity test.

Based on the results of statistical tests in this research, it was found that the variables of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee partially and simultaneously had a positive and significant effect on Return on Assets (ROA).

Keywords: Good Corporate Governance, Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, dan Return on Assets (ROA)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENGESAHAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.1.2.1 Definisi <i>Governance</i>	17
2.1.2.2 Definisi <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.2.3 Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i>	21
2.1.2.4 Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	23
2.1.3 Kinerja Keuangan	26
2.1.3.1 Definisi Kinerja Keuangan	26
2.1.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan.....	27
2.1.3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Pikir.....	32

2.4 Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Rancangan Penelitian.....	35
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.3 Populasi dan Sampel	35
3.3.1 Populasi.....	35
3.3.2 Sampel	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4.1 Jenis Data.....	38
3.4.2 Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.6.1 Variabel Penelitian	39
3.6.1.1 Variabel Independen	39
3.6.1.2 Variabel Dependen.....	40
3.6.2 Definisi Operasional Variabel	41
3.7 Metode Analisis Data	42
3.7.1 Uji Asumsi Klasik	42
3.7.1.1 Uji Normalitas	42
3.7.1.2 Uji Multikolinearitas.....	43
3.7.1.3 Uji Autokorelasi	43
3.7.1.4 Uji Heteroskedastisitas	44
3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif	45
3.7.3 Analisis Regresi Berganda.....	45
3.7.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	46
3.7.5 Uji Hipotesis.....	46
3.7.5.1 Uji Secara Parsial (Uji T)	46
3.7.5.2 Uji Secara Simultan (Uji F)	47
BAB IV PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.2. Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	55
4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif	61
4.2.3 Analisis Regresi Berganda.....	62

4.2.4	Koefisien Determinasi (R^2)	64
4.2.5	Uji Hipotesis	65
4.3.	Pembahasan	68
BAB V	PENUTUP	68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	68
5.3	Keterbatasan Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Berbagai Kasus Masalah dalam Penerapan GCG	3
Tabel 1.2 Berbagai Kasus Masalah Penerapan GCG di Indonesia	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Daftar Sampel	36
Tabel 3.2 Definisi Operasional	41
Tabel 4.1 Hasil Rekapitulasi Data Dewan Direksi (X1)	48
Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Data Dewan Komisaris (X2)	49
Tabel 4.3 Hasil Rekapitulasi Data Komite Audit (X3)	51
Tabel 4.4 Hasil Rekapitulasi Data <i>Return on Assets</i> (Y)	52
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif	61
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Berganda	63
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Secara Parsial (Uji T)	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	34
Gambar 4.1 <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting yang harus disusun oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan yang disusun berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan perusahaan (Hery, 2018). AR (2017) juga menjelaskan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*), serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan berupa posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Bagi pihak internal perusahaan, laporan keuangan ini dapat berfungsi sebagai dasar informasi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai perkembangan perusahaan. Sedangkan bagi pihak eksternal, laporan keuangan suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai informasi bahan pertimbangan dalam pemberian modal (Fadlol, Kartini, & Kantun, 2018).

Maith (2013) menjelaskan bahwa penilaian tingkat atau kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan menjadi alat ukur bagi para investor untuk menilai suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan akan selalu menjaga kondisi keuangan perusahaan dalam posisi yang aman (Setiawan, 2013). Analisis laporan keuangan memerlukan berbagai laporan keuangan. Pertama, laporan

posisi keuangan (*statement of financial position*) yang merangkum aset, liabilitas, dan ekuitas suatu bisnis dalam periode waktu tertentu, biasanya per tahun atau per kuartal. Kedua, laporan laba rugi (*income statement*) yang merangkum pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya per tahun atau per kuartal. Neraca merepresentasikan posisi keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu dan laporan laba rugi menggambarkan profitabilitas perusahaan (van Horne & Wachowicz, Jr., 2008).

Penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan menjadi sangat penting, utamanya dalam pengelolaan perusahaan di era globalisasi yang telah menjadi semakin kompleks. Menganalisis suatu laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit-unit informasi yang lebih kecil dan menilai hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai relasi makna satu sama lain, baik data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan dalam proses pengambilan keputusan secara tepat (Harahap, 2011). Perusahaan yang merupakan suatu institusi ekonomi yang memiliki tujuan atau orientasi untuk memaksimalkan keuntungan/profit. Hal ini yang menjadi pendorong suatu perusahaan untuk memperoleh daya saing strategis agar dapat meningkatkan kinerja perusahaannya hingga ke titik maksimum atau optimal. Namun, dalam berbagai kasus terdapat beberapa perusahaan yang gagal dalam upaya penciptaan nilai tersebut. Black, Jang, dan Kim (2005) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi penciptaan atau peningkatan kinerja dan nilai perusahaan ialah tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Konsep *corporate governance* sendiri di bank-bank maupun perusahaan-perusahaan besar telah menjadi suatu topik kunci dalam berbagai agenda kebijakan

dalam perkembangan ekonomi pasar abad ke-21. Misalnya saja di benua Afrika, konsep ini telah berkembang secara progresif dan menjadi perhatian utama dalam berbagai kajian bisnis. Dipercaya bahwa krisis Asia dan performa buruk sektor korporasi di benua Afrika yang menyebabkan isu *corporate governance* ini menghiasi berbagai perdebatan seputar perusahaan (Berglof dan von Thadden dalam Uwuigbe dan Fakile, 2012). Dibra (2016) juga menyebutkan bahwa pada awalnya, *corporate governance* seringkali diabaikan sebagai hal yang berpotensi penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Hingga terjadi berbagai gelombang *corporate fraud* di Amerika Serikat pada tahun 1990-an yang kemudian diidentifikasi sebagai efek dari kurangnya penerapan *corporate governance*. Berikut beberapa kasus masalah dalam penerapan *corporate governance*.

Tabel 1.1 Berbagai Kasus Masalah dalam Penerapan GCG

Perusahaan	Negara	Tahun	Dugaan Insiden
Bangkok Bank of Commerce	Thailand	1996-1997	Manajer bank memindahkan uang ke perusahaan luar negeri miliknya.
Malaysia Air System Bhd.	Malaysia	1998	Kepala perusahaan menggunakan dana perusahaan untuk membayar hutang pribadinya.
Samsung Electronics Co.	Korea	1997-1998	Manajer menggunakan uang dari Samsung Electronics untuk membiayai kerugian yang dialami oleh Samsung Motors.
Hyundai	Korea	1998-1999	Manajer dana investasi Hyundai menyalurkan uang dari investor ritel ke perusahaan yang merugi dalam grup Hyundai.

Sumber: (Johnson, Boone, Breach, & Friedman, 1999)

Selanjutnya penulis juga merangkum beberapa contoh kasus penerapan *good corporate governance* yang buruk di Indonesia sebagai berikut.

Tabel 1.2 Berbagai Kasus Masalah Penerapan GCG di Indonesia

Perusahaan	Tahun	Masalah GCG
PT Bank Lippo Tbk.	2002	Pelanggaran prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas karena telah lalai dengan mencantumkan kata " <i>audited</i> " dalam laporan keuangan yang telah diaudit serta menyebabkan pemegang saham memperoleh informasi keuangan yang tidak diaudit (Budiartini, Rudy, & Purwanti, 2012).
PT Indofarma Tbk.	2004	Dalam <i>press release</i> yang dikeluarkan oleh Bapepam pada 8 November 2004 terungkap bahwa nilai yang disajikan dalam laporan keuangan PT Indofarma pada 2001 lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dilaporkan (<i>overstated</i>) sehingga menyebabkan informasi laporan keuangannya menjadi menyesatkan (Sulistiawan, Januarsi, & Alvia, 2011).
Bank Century	2008	Pengelolaan oleh manajemen yang buruk dan indikasi tindak kejahatan perbankan dilakukan oleh pemilik Bank Century (Hutama, 2014). Diantaranya pemberian <i>Letter of Credit</i> (LC) kepada sepuluh debitur, pemberian kredit kepada debitur, penggelapan dana milik Bank Century oleh Dewi Tantular, pemberian fasilitas agunan diambil alih, praktik penciptaan <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> yang melanggar prinsip perbankan 147, jual beli surat berharga dalam valuta asing serta penggelapan dana oleh Robert Tantular (Tempo, 2014).

PT Pertamina (Persero)	2009	Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan serta jajaran direksi menyetujui akuisisi (investasi non-rutin) berupa pembelian sebagian aset (<i>interest participating/IP</i>) milik ROC Oil Company Ltd di blok BMG Australia tanpa surat perintah (CNN Indonesia, 2019).
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2019	Dalam hasil audit yang dikemukakan oleh BPK ditemukan dugaan transaksi jual beli saham dan rekayasa harga dengan Bank BJB (BJBR), Semen Baturaja (SMBR), dan PT PP Properti Tbk. (PPTO). Selain itu Jiwasraya menggunakan dana titipan nasabah melalui <i>JS Saving Plan</i> untuk berinvestasi di saham perusahaan yang berisiko tinggi; tidak dungkapkannya penggunaan dana dari <i>JS Saving Plan</i> kepada nasabah dan pemerintah; serta <i>fraud</i> dalam penyusunan laporan keuangan (Studi Profesionalisme Akuntan (SPA) FEB-UI, 2020); (Institute of Compliance Professional Indonesia, 2020).

Sumber: (Diolah oleh penulis, 2020).

Berbagai contoh skandal keuangan diatas menunjukkan bahwa *corporate governance* yang buruk (*bad governance*) dapat menyebabkan suatu perusahaan mengalami kerugian dan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Kinerja keuangan yang buruk dan terjadinya *fraud* seringkali luput dari pengetahuan pemilik perusahaan, pemegang saham, investor, maupun berbagai *stakeholder* lainnya karena terjadi manipulasi laporan keuangan yang memanfaatkan celah-celah prosedur akuntansi atau disebut juga praktik akuntansi kreatif (Susilo, 2018). Maka dari skandal-skandal keuangan yang terjadi, penerapan *good corporate governance* menjadi hal yang sangat krusial bagi setiap institusi ekonomi atau organisasi bisnis. Bertolak dari hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) di Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2006 menerbitkan 5 Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang diharapkan akan menjadi panduan untuk memahami prinsip serta pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia. Kelima pedoman *good corporate governance* ini ialah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima prinsip ini akan membantu perusahaan untuk meminimalisir terjadinya masalah keagenan (*agency problem*) sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat menjadi lebih baik.

Namun, adanya pedoman dan prinsip yang ditetapkan belum dapat menihilkan potensi penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan dalam penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan masih dapat terjadi akibat tidak adanya integritas dari manajemen perusahaan. Dapat muncul masalah ketidaktaatan terhadap pedoman, kesalahpahaman, konflik peran dan kepentingan, serta fungsi pengambilan keputusan diantara manajemen perusahaan, bahkan masih dapat terjadi manipulasi laporan keuangan oleh pihak direksi ataupun manajemen perusahaan. Keberhasilan penerapan *good corporate governance* sangat bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan, etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional yang memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance* (Rini, 2012).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara variabel *good corporate governance* dengan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sarafina dan Saifi (2017) menganalisis dan menjelaskan pengaruh simultan dan dominan dari *good corporate governance* (sub variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit) terhadap kinerja keuangan dan nilai

perusahaan yang dihitung menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan *Tobins'Q* dan menemukan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Indriati (2018) menganalisis hubungan antara variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan dan menemukan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh AR (2017) dengan komponen variabel *corporate governance* berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan independensi Komite Audit menemukan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan independensi Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan, penelitian yang dilakukan oleh Adebayo, dkk. (2014) yang menggunakan komponen variabel *corporate governance* berupa ukuran dewan, kemampuan dewan, kemampuan manajemen, CEO, ukuran Komite Audit, independensi Komite Audit, kepemilikan asing (*foreign ownership*), kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan rapat umum tahunan secara positif berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Industri properti dan *real estate* menjadi salah satu sektor yang menandakan jatuh atau berkembangnya perekonomian suatu negara (Santoso, 2009). Sub sektor ini juga merupakan salah satu instrumen usaha yang biasanya akan dipilih oleh investor karena investasi di sektor ini merupakan investasi jangka panjang dan aktiva multiguna yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan. Dengan adanya peningkatan status kepemilikan rumah milik sendiri akan memberikan kesempatan yang besar, khususnya bagi perusahaan industri

properti dan *real estate* untuk lebih meningkatkan pembangunan perumahan, apartemen, dan bangunan lainnya di berbagai daerah (Sejati, Titisari, & Chomsatu, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari IDX Factbook tahun 2015-2018, terdapat perubahan jumlah perusahaan sub sektor properti dan *real estate* dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 45 perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2015). Pada tahun 2016 terdapat sejumlah 46 perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2016). Pada tahun 2017 terdapat 50 perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2017). Serta pada tahun 2018 terdapat 53 perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2018).

Namun seiring meningkatnya jumlah perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan bahwa kontribusi sektor *real estate* (properti) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami stagnasi dan bahkan cenderung mengalami pelambatan. Pada tahun 2015 sektor ini mampu berkontribusi sebesar 2,84 persen dari PDB. Namun pada tahun 2016 menurun ke posisi 2,83 persen, menurun lagi ke posisi 2,82 persen pada tahun 2017 dan terjun ke posisi 2,74 persen pada tahun 2018 (Suwiknyo, 2019). Menurut Global Business Guide Indonesia (2016), sektor properti industri di Indonesia sedang menghadapi tantangan dimana investor ragu-ragu dan menunda untuk berekspansi ke Indonesia karena faktor ketidakpastian dalam iklim perekonomian lokal dan global. Sektor properti komersial Indonesia bahkan mengalami kemunduran pada tahun 2017 karena *oversupply* dan *slow demand*, salah satu penyebabnya ialah perlambatan ekonomi dan penurunan pada sektor ritel dan energi (Global Business Guide Indonesia, 2018). Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang

dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Properti, Hendro S. Gondokusumo memprediksi bahwa pertumbuhan industri properti akan mengalami stagnasi hingga tahun 2020 (Tempo, 2019). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk meneliti sub sektor properti dan *real estate* ini agar mampu mendorong sub sektor ini keluar dari stagnasi dan mengalami perkembangan serta peningkatan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Maka dari berbagai uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait pengaruh antara GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Judul yang penulis ajukan ialah, “**Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2015-2018)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
2. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?

4. Apakah Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa kontribusi pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh penulis dalam lingkup bidang yang diteliti, yakni manajemen keuangan utamanya terkait konsep *good corporate governance*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, rujukan, serta sumber informasi mengenai pengaruh antara *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan serta dalam perkembangan kajian mengenai *good corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan.

3. Bagi Manajemen Perusahaan dan Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi manajemen perusahaan serta investor dalam mengelola perusahaan untuk mencapai profit yang maksimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini penulis akan membahas kedalam tiga bab yang dapat dirincikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang digunakan sebagai landasan penelitian, serta terdapat penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Secara teoritis, terdapat dari empat model kontrol terhadap perusahaan: (1) *simple finance model*; (2) *stewardship model*; (3) *stakeholder model*; dan (4) *political model* (Turnbull, 1997). *Simple finance model* atau model keuangan sederhana juga dikenal dengan nama teori agensi (*agency theory*). Teori ini mengasumsikan bahwa agen (manajer) adalah orang yang tidak dapat dipercaya, rasional, memiliki *self-interest* dan perilaku oportunistik. Model *stewardship* mengasumsikan bahwa pada dasarnya manajer adalah pengelola yang baik dan akan mengelola perusahaan untuk kepentingan pemilik. Dalam teori ini tidak ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan (Donaldson & Davis, 1991). *Stakeholder model* mengasumsikan bahwa perusahaan adalah suatu sistem *stakeholder* yang beroperasi dalam sistem yang lebih besar dalam masyarakat yang menyediakan infrastruktur hukum dan pasar agar perusahaan dapat berjalan (Indreswari, 2006). Dan terakhir, *political model* mengidentifikasi bahwa alokasi kekuasaan di perusahaan, hak khusus (*privilege*) dan profit pemilik, manajer dan *stakeholder* lainnya ditentukan oleh bagaimana pemerintah menyusun peraturan (Turnbull, 1997). Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada teori agensi (*agency theory*) dikarenakan banyak penelitian sebelumnya terkait *corporate governance* juga menggunakan teori terkait hubungan antara prinsipal dan agen ini.

Untuk memahami teori agensi dalam konsep *corporate governance*, perlu diketahui dulu karakteristik dari perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat tiga bentuk perusahaan, yakni perseorangan (*proprietorship*), kemitraan (*partnership*), dan perseroan terbatas (*limited-liability company*) (Indreswari, 2006). Perusahaan perseorangan (*proprietorship*) merupakan bisnis yang dimiliki hanya oleh satu orang, misalnya restoran dan kedai kopi. Kemitraan (*partnership*) merupakan dimiliki oleh dua orang atau lebih, misalnya firma hukum dan firma akuntansi. Dan terakhir, perseroan terbatas (*limited-liability company*) merupakan entitas hukum yang dimana pemilik dan pengelolanya (manajer) terpisah (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2013).

Pada perusahaan perseroan terbatas, pemiliknya disebut dengan pemegang saham (*shareholders*) karena menyediakan ekuitas modal yang disebut saham. Pemegang saham dapat berupa individu, institusi, perusahaan, maupun entitas lainnya. Pada praktiknya, perseroan terbatas dikelola dan dijalankan oleh tim manajemen atas nama pemilik yang bertanggungjawab untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kondisi dimana pemilik dan manajemen (agen) menyebabkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan dimana akan menimbulkan kondisi kepemilikan tanpa kekuasaan (*property without power*) pada pemilik dan kekuasaan tanpa kepemilikan (*power without property*) pada manajemen (Bicksler, 2003). Untuk melindungi kepentingannya, para pemegang saham akan memilih dewan direksi yang akan bertanggungjawab untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan atas nama pemilik perusahaan.

Pemisahan antara kepemilikan oleh pemegang saham dan kontrol oleh manajemen secara potensial dapat menyebabkan konflik antara pemilik dan agen. Hal ini karena terdapat tendensi alami manusia yang mendorong agen untuk

bertindak sesuai kepentingan pribadinya, secara khusus ketika terjadi konflik antara kepentingan pemilik dan kepentingan pribadi agen, contohnya ketika pemilik perusahaan ingin memaksimalkan keuntungannya dan agen ingin memaksimalkan kepentingan pribadinya. *Self-interest* yang dimiliki oleh agen dapat berupa dalam bentuk pencurian murni (*pure theft*), menikmati manfaat pribadi dari perusahaan, tidak berusaha secara maksimal, dan membuat keputusan yang bias (terlalu banyak atau terlalu sedikit mengambil risiko) (Vives, 2000).

Persoalan *self-interest* dalam masalah keagenan ini dapat ditelusuri hingga pada pemikiran Adam Smith. Menurut Panda dan Leepsa (2017), Adam Smith mungkin merupakan penulis pertama yang menyadari keberadaan masalah keagenan (*agency problem*) dan hal inilah yang menjadi faktor motivasi bagi para ekonom untuk mempelajari aspek-aspek teori agensi. Adam Smith dalam “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” (1776) atau terkenal dengan nama “*The Wealth of Nations*” menyebutkan sebagai berikut.

The directors of such companies, however, being the managers rather of other people's money than of their own, it cannot well be expected that they should watch over it with the same anxious vigilance with which the partner in a private copartnery frequently watch over their own. Like the stewards of a rich man, they are apt to consider attention to small matters as not for their master's honour, and very easily give themselves a dispensation from having it. Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of such a company [...] They have, accordingly, very seldom succeeded without an exclusive privilege; and frequently have not succeeded with one. Without an exclusive privilege, they have commonly mismanaged the trade. With an exclusive privilege, they have both mismanaged and confined it (Smith, 2005).

Adam Smith dengan jelas menyebutkan bahwa manajer yang mengelola perusahaan atas nama pemilik tidak dapat diharapkan dan pemilik harus mengawasinya. Jensen dan Meckling (1976) lebih lanjut mengeksplorasi diskursus terkait pemisahan antara kepemilikan dan kontrol dalam perspektif teori agensi.

Pada teori neoklasik tradisional, perusahaan dianggap sebagai entitas tunggal dengan fungsi produksi sederhana yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui profit. Namun pada teori agensi, perusahaan dianggap sebagai entitas legal yang menjadi perantara (*nexus*) untuk seperangkat hubungan kontraktual antar individu dalam perusahaan. Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai:

“A contract under which one or more persons (the principal(s) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision-making authority to the agent” (Jensen & Meckling, 1976).

Masalah keagenan juga dapat dilihat dalam salah satu karya seorang pujangga, dramawan, dan aktor Inggris, William Shakespeare yang ditulis sekitar tahun 1596 dan 1599 yang berjudul *“The Merchant of Venice”*. Lakon ini menceritakan seorang pedagang asal Venesia yang bernama Antonio yang gelisah ketika menyaksikan kapal-kapal dagangnya berlayar dan kapal-kapal itu harus ia percayakan kepada orang lain untuk menjalankannya, termasuk keuntungan dari perdagangannya. Antonio bertindak sebagai pemilik/*principal* sedangkan kapten-kapten kapal dagangnya bertindak sebagai agen dan terlihat bahwa Antonio sebagai pemilik sangat bergantung pada agen yang menjalankan bisnisnya. Persoalan seperti inilah yang menjadi tantangan utama dalam menjalankan bisnis.

Masalah keagenan (*agency problem*) semacam ini sebenarnya dapat sedikit diatasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), agen (manajer) tidak selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Namun pemilik dapat sedikit mengatasi konflik kepentingan tersebut dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen dan dengan mengeluarkan biaya pengawasan untuk membatasi aktivitas menyimpang yang dilakukan oleh agen. Dalam sebagian besar hubungan

keagenan, pemilik dan agen akan mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) baik dalam bentuk uang maupun non uang namun akan tetap saja agen akan tetap mengambil keputusan yang berbeda dengan keputusan yang seharusnya untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau dengan kata lain, kesejahteraan dari pemilik akan berkurang. Ukuran nilai uang dalam pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh pemilik ini disebut sebagai kerugian residual (*residual loss*) (Jensen & Meckling, 1976). Lebih lanjut, biaya agensi didefinisikan sebagai jumlah total dari: (1) pengeluaran untuk pengawasan oleh pemilik; (2) pengeluaran untuk ikatan oleh agen; dan (3) kerugian residual.

2.1.2 Good Corporate Governance

2.1.2.1 Definisi Governance

Konsep *governance* bukanlah sebuah konsep yang baru. Bahkan konsep ini telah muncul sejak adanya peradaban manusia. Akar kata dari *governance* dapat ditelusuri dari bahasa Yunani *kybernan* (Plato menyebutnya *kubernao*) yang berarti “untuk mengarahkan atau mengemudikan sebuah kapal”. Konsep ini juga digunakan pada masa Kekaisaran Roma yang dalam bahasa Latin disebut *gubernare* yang berarti “untuk mengarahkan, memerintah, dan membimbing” (Ysa, Albareda, & Forbenger, 2014). Ada juga pendapat dari Farrar (2001) yang mengatakan bahwa kata *governance* berasal dari bahasa Perancis kuno, *governance* yang bermakna “*control and the state of being governed*” (kontrol atau keadaan diperintah). Konsep *governance* pada level pemerintahan nasional sebenarnya adalah konsep yang sangat lama. Chaucer (1343-1400), seorang penulis dari Inggris, filsuf, dan punggawa menggunakan kata tersebut, meskipun dia tidak dapat memutuskan bagaimana cara menyebutnya, *gouernance* atau

governance (Tricker, 2019). Sedangkan dalam Kaufmann dan Kraay dalam publikasi World Bank yang berjudul “*Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going?*” menyebutkan bahwa konsep *governance* dapat ditelusuri hingga 400 SM di Arthashastra yang merisalahkan konsep *governance* dengan Kautilya, Menteri Utama dari Raja India. Kautilya menyajikan pilar-pilar kunci dari seni pemerintahan (*art of governance*) yang menekankan pada keadilan, etika, dan kecenderungan anti otokratis. Ia juga merinci tugas dari raja untuk melindungi kekayaan negara dan rakyatnya.

Seiring berjalannya waktu, makna dari *governance* terus berubah hingga pada saat ini dapat dimaknai sebagai interaksi antara pemerintah, *stakeholder* bisnis, dan organisasi non-profit yang menjadi dasar keputusan implementasi kebijakan (Ysa, Albareda, & Forbenger, 2014). World Bank dalam publikasinya yang berjudul “*Governance and Development*” (1992) mendefinisikan *governance* sebagai cara dimana kekuasaan dilaksanakan/diterapkan dalam manajemen sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan. Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton (2000) mendefinisikan *governance* sebagai tradisi dan institusi yang menentukan bagaimana kekuasaan (otoritas) diterapkan di negara tertentu.

Selain itu, *governance* juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat dan menetapkan peraturan serta untuk menyediakan jasa, terlepas dari apakah pemerintah tersebut demokratis ataupun tidak (Fukuyama, 2013). United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) juga turut mendefinisikan *governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. *Governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks

seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance*, dan *local governance*. Definisi lainnya juga dapat ditemukan dalam Oxford Advanced American Dictionaries dimana *governance* berarti aktivitas mengatur sebuah negara atau mengontrol perusahaan atau organisasi serta cara dimana suatu negara diatur atau perusahaan atau institusi dikendalikan.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) menjelaskan bahwa *good governance* memiliki 8 karakteristik utama, diantaranya partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mematuhi peraturan yang berlaku. United Nations Development Programme/UNDP (2014) juga menyebutkan bahwa mekanisme dari *good governance* termasuk transparansi, institusi yang demokratis serta layanan publik yang efisien dan efektif. *Good governance* merepresentasikan proses terbaik yang mungkin dalam mengambil keputusan. Bukan tentang mengambil keputusan yang tepat tetapi tentang proses untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan (Mulinge, Arasa, & Wawire, 2017).

2.1.2.2 Definisi *Corporate Governance*

Teori *corporate governance* berevolusi seiring dengan perkembangan perusahaan modern yang dikarakterisasikan dengan pemisahan antara kepemilikan dan kontrol, gagasan pemilik (sekelompok orang yang menyediakan modal untuk operasional perusahaan), serta agen (sekelompok orang yang menjalankan operasi keseharian perusahaan atas nama pemilik) (Indreswari, 2006).

Corporate governance menggambarkan semua pengaruh yang memengaruhi proses kelembagaan, termasuk untuk menunjuk pengontrol

dan/atau regulator, yang terlibat dalam mengatur produksi dan penjualan barang dan jasa (Turnbull, 1997). Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (1999) menyebutkan bahwa *corporate governance* berhubungan dengan sarana internal dimana perusahaan dioperasikan dan dikendalikan. Sementara Shleifer dan Vishny (1997) mengatakan bahwa *corporate governance* berhubungan dengan cara dimana penyedia keuangan (*suppliers of finance*) dari perusahaan meyakinkan dirinya untuk mendapatkan *return* dari investasi mereka. Namun definisi ini masih terbilang dangkal karena hanya menekankan pada penyedia keuangan dan tidak mengidentifikasi hubungan antara *stakeholder* perusahaan dengan manajer perusahaan. Setiap perusahaan memiliki banyak *stakeholder* dengan kepentingan yang berbeda-beda yang harus diurus (Mulili & Wong, 2011). Inilah yang membuat *corporate governance* dapat juga dikatakan sebagai kelompok kolektif dengan kekuasaan dan otoritas untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengatur suatu organisasi (Ruin, 2001).

Cadbury Committee (2000) mendefinisikan *corporate governance* sebagai “sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan”. Dimana berdasarkan definisi ini, Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Definisi lainnya terkait *corporate governance* dapat dilihat pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

2.1.2.3 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, diantaranya.

a. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham. Akuntabilitas berarti kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. *Responsibilitas* atau pertanggungjawaban yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

d. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sementara menurut Kepmen BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 menggunakan istilah kemandirian yang bermakna suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut Kepmen BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Damak (2013) menjelaskan bahwa sistem *corporate governance* mencakup semua mekanisme yang dirancang untuk mengendalikan manajer dan mengurangi konflik kepentingan yang dianggap mahal. Terdapat dua jenis mekanisme *corporate governance*, yakni mekanisme internal dan eksternal. Gilson (1990); Hermalin dan Weisbach (1988); dan Kaplan dan Reishus (1990) dalam Barnhart dan Rosenstein (1998) mengemukakan bahwa yang termasuk mekanisme internal antara lain kepemilikan manajerial dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris yang dalam hal ini adalah komposisi dewan. Sedangkan mekanisme eksternal seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan tingkat pendanaan dengan hutang (Barnhart dan Rosenstein, 1998; Boediono, 2005).

Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI (2001) menjelaskan bahwa berkenaan dengan mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda, yakni *One-tier System (Anglo-Saxon)* dan *Two-tier System (Kontinental Eropa)*. Sistem hukum *Anglo-Saxon/One-tier System* hanya memiliki satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menggunakan sistem ini misalnya Amerika Serikat dan Inggris. Sedangkan sistem hukum Kontinental Eropa/*Two-tier System* memiliki dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Direksi bertugas mengelola dan

mewakili perusahaan dibawah pengarah dan pengawasan Dewan Komisaris. Dalam sistem ini, anggota Dewan Direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (Dewan Komisaris). Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Negara-negara yang menggunakan sistem ini diantaranya adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Penjelasan yang serupa terkait sistem ini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Dewan (*European Community/EC*) No. 2157/2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang Statuta untuk Perusahaan Eropa (*Statute for a European company/SE*) Pasal 38 yang menjelaskan bahwa perusahaan terdiri dari: (a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (b) organ pengawas dan organ manajemen (*two-tier system*) atau organ administratif (*one-tier system*) bergantung pada bentuk yang diadopsi dalam undang-undang. Karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, maka hukum perusahaan di Indonesia juga menganut *Two-tier System* untuk struktur dewan dalam perusahaan (FCGI, 2001).

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi dewan direksi, dewan komisaris, serta komite audit.

a. Dewan Direksi

Dewan direksi disebut juga dewan manajemen. Anggota dewan manajemen diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. Jumlah dari anggota dewan tergantung pada ukuran perusahaan, serta penetapan aturan dan anggaran dasar perusahaan (Block & Gerstner, 2016). Azmy, Anggreini, dan Hamim (2019) menambahkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi, penentuan jumlah pendapatan, dan distribusi tugas dan wewenang masing-masing anggota dewan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi mencakup lima tugas utama, yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial (KNKG, 2006).

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris sering juga disebut dewan pengawas (*supervisory board*). Dewan pengawas memberikan nasihat kepada dewan manajemen/dewan direksi secara berkala mengenai manajemen perusahaan dan grupnya serta memantau upaya pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan (Gregory, 2000). Menurut FCGI (2001), dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Egon Zehnder dalam FCGI (2001) menambahkan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam perusahaan.

c. Komite Audit

Komite audit adalah komite kecil direktur yang independen dan berbeda dengan direktur. Komite audit bertanggungjawab atas laporan eksternal perusahaan, memantau risiko, dan mengendalikan proses serta menjalankan fungsi audit internal dan eksternal (Azmy, Anggreini, & Hamim, 2019). Komite audit juga bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Pada umumnya, komite audit memiliki tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu: (a) laporan keuangan (*financial reporting*); (b) *corporate governance*; dan (c) pengawasan perusahaan (*corporate control*).

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) berarti “sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan)”. Sedangkan Oxford Advanced Learner’s Dictionary mendefinisikan kinerja (*performance*) sebagai “seberapa baik atau buruk dalam melakukan sesuatu; seberapa baik atau buruknya sesuatu bekerja”. Dari kedua definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan ialah pencapaian atau prestasi atau kemampuan kerja suatu perusahaan serta dapat dikatakan pula bahwa kinerja keuangan menggambarkan seberapa baik atau buruk suatu perusahaan beroperasi.

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan (Orniati, 2009). Fahmi dalam Kaunang (2013) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Selain itu, kinerja keuangan merupakan gambaran yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian mengenai kondisi-kondisi keuangan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan (Jumingan dalam Firdauziah, 2019). Sedangkan Naz, Ijaz, dan Naqvi (2016) menjelaskan bahwa kinerja keuangan ialah sejauh mana kesehatan keuangan perusahaan yang diukur selama periode waktu tertentu. Pengukuran

kinerja keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap kepada para pemegang saham dan *stakeholder* untuk mendorong mereka dalam pengambilan keputusan. Kinerja keuangan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dengan membandingkannya dengan kinerja keuangan dari perusahaan sejenis dari industri yang sama.

2.1.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2012) yang menjelaskan uraian maksud dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yakni kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yakni kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
4. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yakni kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok hutang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan.

2.1.3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Secara umum, terdapat dua jenis rasio keuangan. Pertama, rasio neraca (*balance sheet ratios*) yang merangkum beberapa aspek dari kondisi keuangan (*financial condition*) perusahaan pada waktu tertentu. Kedua, laporan laba rugi (*income statement*) yang merangkum aspek-aspek kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, biasa selama satu tahun (van Horne & Wachowicz, Jr., 2008). Van Horne dan Wachowicz, Jr. (2008) menjelaskan berbagai ukuran kinerja keuangan yang meliputi rasio-rasio sebagai berikut.

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini membandingkan liabilitas jangka pendek (*current liabilities*) dengan aset jangka pendek (*current assets*). Dari rasio ini, dapat diperoleh pengetahuan mengenai kemampuan perusahaan untuk membiayai dan memenuhi kewajiban saat ditagih.

2. Rasio Leverage (*Financial Leverage/Debt Ratio*)

Rasio *leverage* atau *Debt-to-Equity Ratio* (DER) digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan hutang. DER dihitung dengan membagi total hutang perusahaan (termasuk kewajiban lancar) dengan ekuitas pemegang saham.

3. Rasio Cakupan (*Coverage Ratio*)

Rasio cakupan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas atau melunasi hutang dan bentuk obligasi lainnya. Salah satu bagian dari rasio cakupan ialah rasio cakupan bunga (*interest coverage ratio*) yang

menggambarkan rasio penghasilan sebelum bunga dan pajak untuk periode pelaporan tertentu dengan jumlah beban bunga untuk periode tertentu.

4. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Rasio aktivitas atau juga dikenal sebagai rasio efisiensi atau *turnover* mengukur seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan asetnya, terkhusus piutang (*receivables*) dan persediaan (*inventories*) dan total aset secara umum. Aktivitas piutang (*receivables activity*) atau rasio perputaran piutang (*receivable turnover ratio*) dihitung untuk mengetahui kualitas piutang perusahaan dan seberapa baik perusahaan dalam mengumpulkannya.

5. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menunjukkan profitabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan penjualan dan kaitannya dengan investasi. Rasio ini menunjukkan keseluruhan efektivitas operasi perusahaan. Rasio profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan menunjukkan *profit* yang diterima perusahaan berdasarkan penjualan yang menunjukkan efisiensi operasi perusahaan. Sedangkan rasio profitabilitas yang berkaitan dengan investasi mengukur tingkat *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Assets* (ROA). *Return on Equity* (ROE) juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. *Return on Equity* (ROE) membandingkan *net profit* setelah pajak dengan ekuitas pemegang saham.

2.2 Penelitian Terdahulu

Uraian dibawah ini akan memaparkan berbagai penelitian terdahulu yang meneliti terkait hubungan antara GCG dengan kinerja keuangan perusahaan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Allan Chang Aik Leng dan Shazali Abu Mansor (2005)	<i>Can Good Corporate Governance Practices Contribute to Firms' Financial Performance? – Evidence from Malaysian Companies</i>	Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan, rasio pinjaman dan CEO dominan secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROE.
2	Ietje Nazaruddin (2008)	<i>Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan</i>	Penelitian ini menemukan bahwa <i>corporate governance</i> berkorelasi secara signifikan dengan kinerja perusahaan ketika profitabilitas perusahaan diukur dengan ROA serta <i>corporate governance</i> tidak berhubungan secara signifikan dengan nilai perusahaan atau <i>price earnings ratio</i> .
3	Mudashiru Adebayo, A.O. Bakare Ibrahim, Babatunde Yusuf, dan Ishmael Omah (2014)	<i>Good Corporate Governance and Organizational Performance: An Empirical Analysis</i>	Penelitian ini menemukan bahwa ukuran dewan, kemampuan dewan, kemampuan manajemen, lama menjabat CEO, ukuran komite audit, independensi komite audit, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan Rapat Umum Pemegang Saham secara

			positif berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
4	Mugisha Shema Xavier, Jaya Shukla, Joseph Oduor, dan Mbabazi Mbabazize (2015)	<i>Effect of Corporate Governance on the Financial Performance of Banking Industry in Rwanda (A Case Study-Commercial Banks in Rwanda)</i>	Penelitian ini menembukan bahwa independensi dewan, komposisi dewan, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank komersial di Rwanda.
5	Muhammad Ali (2016)	<i>Impact of Corporate Governance on Firm's Financial Performance (A Comparative Study of Developed and Non Developed Markets)</i>	Penelitian ini mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan ROA sebagai kinerja eksternal dan ROE sebagai kinerja internal. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan dewan, efektivitas dewan, struktur dewan, independensi dewan, dualitas CEO, serta pendidikan dan pengalaman dewan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
6	Almostafa Zayed (2017)	<i>Corporate Governance and Financial Firm Performance: Evidence from Jordan</i>	Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara struktur kepemilikan dan komposisi dewan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, terdapat hubungan yang negatif antara kepemilikan manajerial dan

			kinerja keuangan perusahaan.
7	Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)	Penelitian ini menemukan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Secara parsial, masing-masing variabel GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Sumber: (Diolah oleh penulis, 2020).

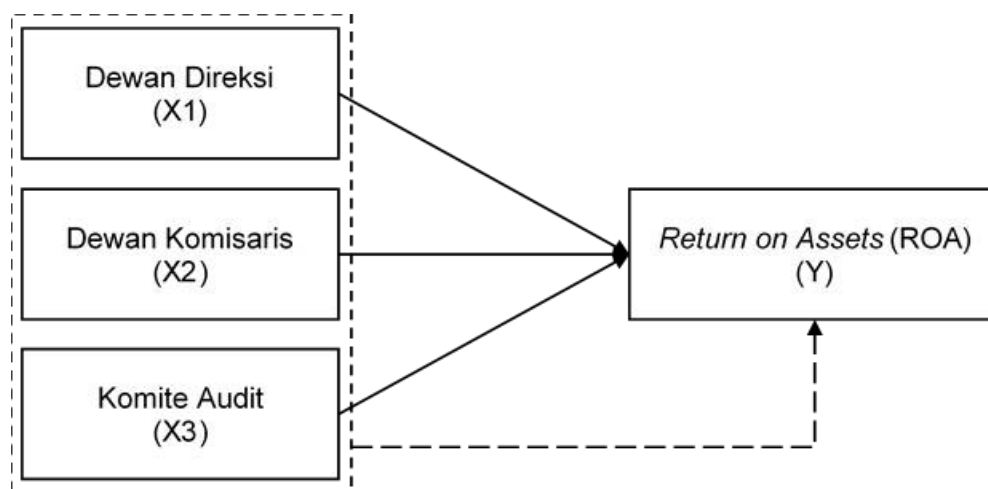
2.3 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini yang akan menjadi variabel dependen adalah *Return on Assets* (ROA) untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan yang menjadi variabel independen ialah dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit sebagai bagian dari GCG.

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio keuangan yang paling populer dan bermanfaat. Rasio ini disebut *Return on Investment* (ROI) dan dihitung sebagai laba dibagi dengan total aset (Jewell & Mankin, 2011). Rasio ini menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya (Kasmir dalam Kurniasari, 2017).

Dalam penelitian ini, sesuai dengan landasan teori yang telah disusun, dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut.

1. Dewan Direksi (Dewan Manajemen) merupakan struktur perusahaan yang pengangkatan dan pemberhentiannya, penentuan jumlah pendapatannya, serta distribusi tugasnya dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan direksi mencakup lima tugas utama, yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas (*Supervisory Board*) merupakan dewan yang bertugas dalam menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen (dewan direksi) dalam mengelola perusahaan, serta menjaga terlaksananya akuntabilitas dalam perusahaan.
3. Komite Audit merupakan komite yang bertanggungjawab pada laporan keuangan perusahaan (*financial reporting*), *corporate governance*, serta pengawasan dan audit internal dan eksternal perusahaan (*corporate control*).

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: (Diolah oleh penulis, 2020).

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka hipotesis penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diduga bahwa Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018.
2. Diduga bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018.
3. Diduga bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018.

4. Diduga bahwa Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018.